BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, bangunan dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang sering kali sulit diprediksi oleh para investor. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan ketidakpastian, maka investor memerlukan berbagai macam informasi untuk memperkecil resiko yang akan para investor hadapi. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus menetapkan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah yang terkait dengan dividen.

Masing-masing perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Perusahaan perlu membuat kebijakan tentang besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau biasa disebut dividen, dan besarnya laba yang akan ditahan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang dibagikan dalam

UNMAS DENPASAR

bentuk dividen akan semakin menarik bagi calon investor. Ini karena para calon investor menilai bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat dan memiliki prospek yang baik di masa mendatang (Horne dan Wachowicz, 2010:270).

Kebijakan dividen mungkin telah menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Dalam Jakarta, CNN Indonesia (27/03/2017) kasus PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) memutuskan tidak membagikan keuntungan (dividen) kepada pemegang saham untuk tahun buku 2016. Pasalnya, keuangan perusahaan memburuk pada periode tersebut. Febriany Eddy, Direktur keuangan Vale Indonesia menjelaskan, pembagaian dividen biasanya diukur oleh berbagai faktor seperti ketersediaan arus kas dan laba bersih. Dilihat laba bersih pada tahun 2016 sebesar US$ 1,9 juta, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sbelumnya. Selain itu perusahaan juga perlu menyimpan laba bersih yang didapatkan sebagai penambahan kas perusahaan untuk kebutuhan ekspansi.

Kemudian fenomena lainnya adalah pada Bank Mandiri (Persero) Tbk rasio pembayaran dividen sebesar 25% dari laba bersih yang berjumlah RP. 19,9 triliun. Dengan adanya pengurangan dividen ini dapat menguatkan posisi CAR *(capital adequacy ratio)* dan merupakan keputusan bersama demi menunjang rencana kerja Bank Mandiri ke depan. Bank Mandiri berencana untuk menjadi bank terbesar di Asean dari segi kapitalisasi pasar pada tahun 2020, sehingga memerlukan rasio *Return On Equity* (ROE) sebesar 22% hingga 23% per tahun sehingga diperlukan adanya permodalan yang kuat.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan fenomena tersebut, pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan, dengan tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah. Penggunaan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) pada industri perbankan di Indonesia akan menjadikan perusahaan memiliki kesempatan ekspansi yang tinggi agar lebih mudah dalam akses pendanaan dari investor untuk memperkuat posisi permodalan perusahaan. Informasi *rating* perbankan yang relevan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi sehubungan dengan ekspektasinya terhadap dividen tunai yang dibayarkan.

Keberhasilan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari sektor perbankan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lain dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perusahaan perbankan dipilih karena termasuk sektor yang berpengaruh penting terhadap keuangan dan perekonomian, perbankan memiliki perkembangan kinerja yang baik sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi serta memberikan harapan bagi para investor untuk memperoleh pendapatan yang besar jika berinvestasi di perusahaan perbankan. Kebijakan dividen pada industri perbankan merupakan kebijakan yang sangat penting, sebab akan

UNMAS DENPASAR

melibatkan dua pihak yaitu pemegang saham dan manajemen bank yang dapat mempunyai kepentingan yang berbeda (Lingga, 2021).

Begitu pentingnya peranan dividen, maka perusahaan enggan melakukan pemotongan terhadap dividen. Perusahaan yang melakukan pemotongan dividen menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan kurang bagus sehingga permintaan pasar terhadap saham perusahaan tersebut akan turun yang artinya para investor enggan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan menaikkan dividen, menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang bagus dengan kondisi tersebut maka perusahaan harus menjamin dividen terhadap investor.

Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan yang menjadi bagian paling penting dalam setiap perusahaan. Menurut F. Wuisan, dkk. (2018) kebijakan dividen berisi mengenai sebuah keputusan apakah laba yang dihasilkan perusahaan pada suatu akhir periode akuntansi akan didistribusikan kepada para pemegang saham atau apakah laba tersebut akan kembali tersimpan di dalam perusahaan dalam bentuk saldo laba yang kemudian akan digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan tidak hanya memiliki sebuah arti yang penting bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga mempunyai arti yang penting bagi para pemegang saham perusahaan tersebut. Bagi para pemegang saham, dividen merupakan sebuah kompensasi yang diperoleh dari kontribusi penyediaan dana yang telah diberikan kepada perusahaan selain *capital gain* yang

UNMAS DENPASAR

diperoleh apabila harga jual saham lebih tinggi dari harga pada saat pembelian saham.

Pada umumnya, para pemegang saham lebih mengharapkan pembagian dividen yang relatif stabil dari waktu ke waktu atau cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pembagian dividen yang relatif stabil dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemegang saham terhadap perusahaan, sehingga akan dapat mengurangi unsur-unsur ketidakpastian dalam investasi. Pembagian dividen dalam bentuk tunai *(cash dividend)* lebih diharapkan diperoleh para pemegang saham daripada pembagian dividen dalam jenis lain seperti dividen saham, dividen properti, dan dividen likuidasi karena dapat mengurangi ketidakpastian pemegang saham dalam aktivitas investasinya ke dalam suatu perusahaan. Pemilihan jenis pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham bergantung pada kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan (F. Wuisan, dkk. 2018).

UNMAS DENPASAR

Pemilik perusahaan umumnya menginginkan agar sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan dibagikan sebagai dividen. Manajer keuangan harus dapat menjaga keseimbangan antara kebijakan dividen dengan kepentingan pemilik (Zahidda dan Sugiyono, 2017). Jumlah uang yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk dividen berbeda dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Kebijakan dividen yang telah diputuskan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan menjadi

acuan perusahaan untuk menentukan besaran dividen yang dibagikan kepada masing-masing pemegan saham (Kawshala dan Panditharathna, 2017).

Penelitian ini menggunakan *dividend payout ratio* sebagai proksi atas kebijakan dividen perusahaan. Menurut Fitriati, dkk. (2018), *dividend payout ratio* menentukan porsi keuntungan yang akan dibagi kepada pemegang saham dan yang akan ditahan untuk digunakan sebagai modal operasi perusahaan pada periode selanjutnya. *Payout ratio* adalah pengukuran persentase laba bersih yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai (Weygandt, dkk. 2019: 634). Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan saldo laba sebagai sumber pendanaan (Kuniawan, dkk. 2016). Menentukan kebijakan dividen, perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yaitu kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, jaminan aset, posisi kas dan struktur modal yang diproksikan dengan menggunakan *debt equity ratio* (DER).

UNMAS DENPASAR

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki pihak luar perusahaan yaitu investor institusional. Keunggulan dari struktur kepemilikan institusional adalah keterandalan informasi dalam analisis informasi yang dapat meningkatkan motivasi pengawasan aktivitas perusahaan yang lebih ketat sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Investor institusional akan lebih berhati-hati dalam mengendalikan pengambilan keputusan pihak manajemen yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang

saham terutama terkait dengan kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan (Dhuhri dan Diantimala, 2018). Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula pengawasannya sehingga manajemen akan memberikan kinerja terbaiknya yang akan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Peningkatan keuntungan ini akan berdampak pada peningkatan dividen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Mertha (2019), serta Rahayu dan Ellen (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan Lilis dan Suryanto (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Hasudungan (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan.

Dalam menentukan kebijakan dividen, perusahaan akan memperhatikan pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama (Machfoedz, 1996:108). Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. Dalam menentukan kebijakan dividen, perusahaan akan memperhatikan pertumbuhan perusahaan, dengan semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk membiayai pertumbuhanya di masa datang sehingga perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang untuk menahan pendapatanya dari pada dibayarkan sebagai dividen dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Sedangkan perusahaan yang

UNMAS DENPASAR

memiliki ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga dengan kesempatan itu perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang saham. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Dengan demikian perusahaan yang sedang bertumbuh dan berfokus pada ekspansi akan mengurangi proporsi keuntungan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham, sehingga berpotensi menurunkan juga tingkat *dividend payout ratio*. Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *dividend payout ratio*, menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (Situmorang, 2017). Penelitian Afas, dkk. (2017) juga memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Iswara (2017) yang menyatakan bahwa asset *growth* berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Jaminan aset *(collateralizable assets)* adalah aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Kreditur seringkali meminta jaminan berupa aset ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan. Tingginya jaminan aset yang dimiliki perusahaan akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur sehingga perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah yang besar. Sabaliknya, semakin rendah jaminan aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur sehingga kreditur akan menghalangi perusahaan untuk membiayai

UNMAS DENPASAR

dividen dalam jumlah yang besar kepada pemegang saham karena takut piutang mereka tidak akan terbayar (Darmayanti & Mustanda, 2016). Menurut Riyanto (2013:217) *collateralizable assets* merupakan besarnya aktiva yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Mangasih & Asandimitra (2017) berpendapat bahwa semakin banyak *collateralizable assets* akan meningkatkan pembagian dividen pada pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *collateralizable assets* maka semakin tinggi pula nilai kebijakan dividen suatu perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti dan Mustanda (2016) serta Arfan dan Maywidlan (2013), yang menunjukan bahwa *collateralizable assets* berpengaruf positif terhadap kebijakan dividen. Berbeda dengan Helmina dan Hidayah (2017) yang menemukan bahwa *collaterizable asset* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.

Posisi kas adalah kas yang berada di perusahaan yang dapat digunakan mendanai pertumbuhan internal, serta melunasi hutangnya. Posisi kas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Posisi kas menggambarkan jumlah kas yang tersedia dibandingkan dengan laba bersih perusahaan. Besar kecilnya posisi kas menunjukan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola dana tunai di dalam perusahaan serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil (Simatupang & Kholis, 2017). Semakin tinggi deviden maka posisi kas perusahaan semakin

UNMAS DENPASAR

kuat. Jika perusahaan tidak memiliki posisi kas maka perusahaan tersebut tidak mampu untuk mempertahankan produktivitas atau membiayai dividen terhadap investornya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simatupang & Kholis (2017) menunjukan bahwa tidak ada pengaruh cash position terhadap kebijakan dividen. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Setiawan *et al*. (2018) menunjukkan bahwa posisi kas berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Vidia & Darmayanti (2016) bahwa posisi kas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.

Struktur modal *(capital structure)* adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (Martono, 2007:240). Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan. Struktur modal yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk seluruh utang lancar dengan seluruh ekuitas. Jika utang lebih tinggi menyebabkan pihak manajemen akan memprioritaskan pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan dividen kepada para pemegang saham. Perusahaan dengan rasio utang yang lebih besar akan membuat perusahaan lebih

memilih menjadikan laba ditahan untuk pembayaran kewajibannya sehingga dividen yang dibagikan akan lebih kecil proporsinya (Yudiana & Yadnyana, 2016). Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka akan semakin kecil dividen yang dibagikan karena timbulnya kewajiban yang harus didahulukan. Hasil penelitian dari Praja (2017) menyimpulkan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio*. Sementara Prayunitha (2016), dan Modyoningrum (2016) menyimpulkan bahwa DER berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio.*

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang masih beragam maka penelitian ini akan dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, jaminan aset, posisi kas, dan struktur modal terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disusun perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.?
2) Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.?

UNMAS DENPASAR

3) Apakah jaminan aset berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.?
4) Apakah posisi kas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.?
5) Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh jaminan asset terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

UNMAS DENPASAR

4) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh posisi kas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
5) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh struktur modal terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disampaikan, maka yang menjadi harapan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan tentang pasar modal sebagai sarana untuk pengambilan keputusan berinvestasi atau menjual saham. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dividen kas.

2) Bagi Perusahaan

   Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan untuk mengetahui bagaimana pentingnya kebijakan dividen bagi para investor agar perusahaan semakin meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja keuangannya untuk dapat memnuhi pembayaran dividen.

3) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

UNMAS DENPASAR

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa berikutnya yang akan melaukakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang terkait dalam penelitian ini serta menambah pembendaharaan dalam rangka pengembangan materi perkuliahan khususnya jurusan Akuntansi Fakulyas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati.

4) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor dalam menambah informasi apabila ingin berinvestasi pada perusahaan yang bersangkutan.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai satu kontrak antara *principals* (pemilik) dengan *agents* (agen) untuk melaksanakan pekerjaan atas nama *principals* dengan mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Kontrak yang dimaksudkan disini adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principals-agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs*. Dalam konteks ini *agency costs* adalah merupakan biaya (*transaction cost* atau lebih tepat lagi *cost of governance*) yang terjadi manakala solusi organisasi adalah yang dìpilih (Gudono 2012:147).

Gudono (2012:151) menyatakan bahwa dengan kondisi agen yang oportunistik, memiliki informasi yang lebih banyak dan pada prinsipal, dan memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal, masalah mendasar di dalam teori keagenan adalah bagaimana caranya agar

UNMAS DENPASAR

agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipalnya. Salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menerapkan *employment contract* yang di dalamnya mengandung sistem kompensasi yang tepat untuk manajemen. Namun demikian output bisa saja sukar diamati, tidak sepenuhnya merefleksikan upaya *(effort)* agen, dan berfluktuasi tergantung pada faktor-faktor di luar hal yang bisa dikendalikan oleh agen.

Menurut Gudono (2012:155) sebuah pendapat, model, atau teori apapun harus dipahami dalam satu kesatuan dengan asumsi-asumsi di mana pendapat, model, dan teori tersebut dibangun, demikian pula dengan teori keagenan *(agency theory)*. Di dalam teori keagenan para pelaku ekonomi diduga akan mementingkan dirinya sendiri, rnenyembunyikan kebenaran, menipu dan melakukan kecurangan. Itulah mengapa dalam teori keagenan ada dua solusi penting yaitu monitoring terhadap perilaku agen dan pemakaian insentif untuk memotivasi agen agar mau bertindak baik.

Menurut Miller (2005), ada enam asumsi dalam teori keagenan, yaitu:

1) Tindakan agen akan mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh prinsipal.
2) Karena prinsipal tidak bisa melihat tindakan agen, maka prinsipal harus menggunakan *outcome* sebagai indikasi tindak agenan.
3) Preferensi agen tidak sama dengan preferensi prinsipal.
4) Prinsipal adalah aktor yang rasional.
5) Baik prinsipal maupun agen sama-sama memahami rasionalitas agen.
6) Prinsipal memiliki bargain power tatkala menetapkan kontrak dengan agen.

UNMAS DENPASAR

Dalam teori keagenan *(agency theory)* konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk kepentingan yang berbeda dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun tidak menguntungkan prinsipal. Sebagai contoh yaitu di dalam penetapan kebijakan dividen, konflik kepentingan yang muncul yaitu kebijakan pembagian dividen dan laba yang diperoleh perusahaan. Dan sisi investor menginginkan dividen yang tinggi. Sedangkan dari perusahaan, jika membayar dividen yang tinggi, maka laba untuk perusahaan tersebut akan menjadi rendah.

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence. Spence (1973) mengatakan dengan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Signaling theory menyatakan bahwa dividen akan mengurangi ketimpangan informasi antar manajemen dan pemegang saham dengan menyiratkan informasi privat tentang prospek masa depan perusahaan (Gumanti,8:2013). Kenaikan jumlah dividen tunai dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa depan. Kenaikan dividen tunai sering menyebabkan kenaikan harga saham yang berarti bahwa

nilai perusahaan meningkat, sementara pemotongan dividen umumnya menyebabkan penurunan harga saham yang berarti penurunan nilai saham.

2.1.3 Teori Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. Terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Gumanti (2013:8) diantaranya adalah sebagai berikut.

a. *Theory Bird in the Hand*

Theory Bird in the Hand ini menyatakan bahwa investor merasa lebih aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen tunai daripada menunggu *capital gain*. Karena menerima dividen tunai dinilai mengurangi ketidakpastian dan ketidak sempurnaan pasar yang berarti mengurangi resiko.

b. *Tax Preference Theory*

UNMAS DENPASAR

Teori ini menyatakan bahwa investor atau pemegang saham lebih menyukai perusahaan yang membagi dividen sedikit, karena jika dividen dibayarkan tinggi, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh investor atau pemegang saham juga akan tinggi.

c. *Dividend Irrelevance Theory*

Teori ini mengatakan bahwa dividen bersifat tidak relevan atau tidak mempengaruhi seorang investor. Menurut Miller, M. H (1961), nilai suatu perusahaan tergantung pada besarnya proporsi dividen yang dibagikan

kepada pemegang saham maupun terhadap biaya modalnya, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan risiko bisnis (Welas dan Nugroho, 2019).

d. Tax Differential Theory

Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan *capital gains*, para investor lebih menyukai *capital gains* karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen dari pada *capital gains*. Tapi MM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang diatas biasanya merupakan suatu tanda kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik dividen masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang dibawah kenaikan normal (biasanya) diyakini investor sebagai suatu tanda bahwa perusahaan menghadapi masa sulit dividen waktu mendatang. Seperti teori dividen yang lain, teori ini juga sulit dibuktikan secara empiris.

e. Teori Clientele Effect

Teori ini menyatakan bahwa kelompok *(clientele)* pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya

UNMAS DENPASAR

mengurangi total sumber dana intern atau *internal financing*. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Dengan demikian kebijakan dividen ini harus dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan struktur modal secara keseluruhan.

2.1.4 Kebijakan Dividen

1) Pengertian Dividen

Pengertian dividen menurut Rudianto (2012:290) adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan. Pengertian dividen menurut Rini Andari (2008:78) adalah salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan disamping keputusan investasi dan struktur modal (keputusan permenuhan dana). Dividen juga diartikan sebagai distribusi atas hasil kinerja operasional perusahaan dalam bentuk kas, saham atau dalam bentuk lainnya kepada pemegang saham sebesar proporsi dari jumlah saham yang dimilikinya (Hery, 2017:51).

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan suatu pembagian laba dari suatu usaha yang diberikan kepada pemegang saham dimana laba tersebut dapat berupa dividen tunai atau dividen saham yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan disamping keputusan investasi dan struktur modal.

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan besarnya bagian pendapatan yang akan dibagikan pada para pemegang saham dan bagian

yang akan ditahan perusahaan. Kebijakan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat penting bagi investor maupun perusahaan yang akan membayarkan dividen. Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Kebijakan dividen merupakan rencana tindakan perusahaan yang harus diikuti setiap kali membuat keputusan mengenai pembagian dividen (Gitman dan Zutter, 2015). Kebijakan dividen merupakan keputusan penempatan laba, apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk saldo laba untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Saldo laba adalah sumber dana yang penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan (Fauziah, 2017) sehingga pertimbangan manajemen sangat di perlukan. Ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Bagi para investor mereka cenderung berharap pembayaran dividen lebih besar sedangkan pihak manajemen cenderung menahan kas untuk membayar utang atau meningkatkan investasi. Dalam melaksanakan kebijakan dividennya, perusahaan dapat menggunakan satu dari alternative kebijakan dividen mengenai pola pembayaran dividen itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Rasio pembayaran dividen rasio konstan

   Dalam kebijakan ini, *dividen payout ratio* yang ditetapkan perusahaan konstan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, walaupun *dividen payout ratio*

UNMAS DENPASAR

konstan, jumlah nominal dividen per saham akan berfluktuasi sesuai dengan variasi pendapatan setelah pajak perusahaan.

b) Dividen per saham konstan

Kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan rasio pembayaran dividen konstan. Dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan besaran dividen per saham yang konstan dari tahun ke tahun. Jadi, walaupun pendapatan setelah pajak perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, akan tetapi besarnya dividen per saham yang diharapkan perusahaan akan tetap sama.

c) Dividen kecil dan teratur plus ekstra akhir

Dalam kebijakan ini, perusahaan membagikan dividen yang kecil untuk tiap lembar sahamnya secara teratur. Apabila nantinya pada akhir tahun laba perusahaan mengalami peningkatan maka terdapat ekstra dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

2) Jenis-jenis Dividen

UNMAS DENPASAR

Bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dapat diwujudkan dalam berbagai bentuknya, tergantung pada keadaan perusahaan ketika pembagian dividen tersebut. Menurut Rudianto (2012:290) jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai berikut:

a) Dividen tunai, yaitu bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Sebelum dividen dibagikan, perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen.

Jika perusahaan memilih untuk membagikan dividen tunai itu berarti pada saat dividen akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan memiliki uang tunai dalam jumlah yang cukup.

b) Dividen harta, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan dalam bentuk harta selain kas. Walaupun dapat berbentuk harta lain, tetapi biasanya harta tersebut dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan.

c) Dividen skrip atau dividen utang, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang dimasa datang. Dividen skrip terjadi karena perusahaan ingin membagikan dividen dalam bentuk uang tunai, tetapi tidak tersedia kas yang cukup, walupun laba ditahan menunjukan saldo yang cukup. Karena itu, pihak manajemen perusahaan menjanjikan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang kepada para pemegang saham.

UNMAS DENPASAR

d) Dividen saham, yaitu bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Dividen saham dibagikan karena perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian laba usaha yang diperolehnya secara permanen.

e) Dividen Likuidasi, yaitu dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya, tetapi tidak didasarkan pada besarnya laba usaha atau saldo laba ditahan perusahaan.

Dividen likuidasi merupakan pengembalian modal atas investasi pemilik oleh perusahaan.

3) Syarat Pembayaran Dividen

Jika suatu perusahaan mempertimbangkan pembagian dividen, ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu :

a) Legalitas Dividen

Legalitas dividen dapat ditentukan dengan melihat hukum negara yang berlaku. Sebagai contoh, hukum di suatu negara yang ada menekankan pada solven atau tidaknya suatu perusahaan sebelum perusahaan mengadakan pembagian dividen dan ada yang menekankan bahwa pembagian dividen tidak boleh melebihi nilai wajar dari aset neto, bahkan ada yang menggunakan kombinasi keduanya.

b) Kondisi keuangan

Pengelolaan perusahaan yang baik memerlukan perhatian yang lebih daripada legalitas pembagian dividen. Pertimbangan harus diberikan pada kondisi ekonomi tertentu, terutama likuiditas. Jadi sebelum dividen diumumkan manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Para direktur juga harus mempertimbangkan pengaruh inflasi dan biaya pengganti sebelum melakukan komitmen dividen.

4) Kendala Kebijakan Dividen

Adapun beberapa kendala di dalam pembagian dividen diantaranya adalah sebagai berikut.

UNMAS DENPASAR

a) Perjanjian kredit atau surat pengakuan utang

Biasanya membatasi pembagian dividen dari laba yang dihasilkan setelah pinjaman diberikan. Konrak utang juga seringkali mengisyaratkan bahwa tidak ada dividen yang dapat dibagikan kecuali atau rasio lancar, rasio kemampuan membayar bunga, dan rasio-rasio pengaman lain melebihi batas minimum yang ditetapkan.

b) Ketidakcukupan laba

Pembagian dividen tidak boleh melebihi laba ditahan pada pos neraca. Pembatasan ini disebut *impairment of capital rule*, dirancang untuk melindungi kreditur. Tanpa perarturan tersebut, suatu perusahaan yang tengah dilanda masalah mungkin mendistribusikan sebagian besar asetnya kepada pemegang saham dan membiarkan kreditur membatasi sendiri persoalannya.

c) Ketersediaan dana

UNMAS DENPASAR

Dividen tunai dapat dibagikan hanya dengan uang kas. Jadi, kekurangan kas di bank dapat membatasi pembagian dividen, akan tetapi, hal itu bisa diatasi apabila perusahaan memperoleh pinjaman.

d) Denda pajak atas penimbangan laba yang tidak wajar

Untuk mencegah agar orang kaya tidak menggunakan perusahaan untuk mengindari pajak pribadi, peraturan pajak membuat ketentuan khusus mengenai penimbunan penghasilan yang tidak wajar. Jadi, apabila direktorat pajak dapat menunjukan bahwa rasio pembayaran dividen

perusahaan sengaja dibuat rendah untuk menolong para pemegang saham menghindari pajak pribadi, perusahaan tersebut akan dikenakan denda yang berat.

2.1.5 Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Edison, 2017). Sifat permasalahan keagenan akan ditentukan oleh struktur kepemilikan perusahaan Permasalahan keagenan yang mungkin terjadi adalah konflik yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham serta permasalahan antara pemegang saham pengendali *(controlling shareholders)* dengan pemegang saham minoritas *(minority shareholders)* (Azwari dan Fatah, 2016).

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan (Nisa, dkk. 2017). Keunggulan dari struktur kepemilikan institusional adalah keterandalan informasi dalam analisis informasi yang dapat meningkatkan motivasi pengawasan aktivitas perusahaan yang lebih ketat sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Investor institusional akan lebih berhati-hati dalam mengendalikan pengambilan keputusan pihak manajemen yang tidak sejalan

UNMAS DENPASAR

dengan kepentingan pemegang saham terutama terkait dengan kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan (Dhuhri dan Diantimala, 2018).

2.1.6 Pertumbuhan perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan *size*. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat adanya peningkatan total aset yang dimiliki perushaan serta diwujudkan dengan penggunaan dana untuk kebutuhan investasi (Hery, 2017:60). Kebutuhan dana yang tinggi, khususnya untuk aset perusahaan, memaksa manajemen lebih memprioritaskan sumber pendanaan internal, karena perusahaan yang masih relatif muda sulit untuk mendapatkan akses terhadap modal karena kreditur belum dapat memberikan pinjaman dalam jumlah besar (Gumanti, 2013, hal. 85).

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun (Sari dan Sudjarni, 2015). Menurut Iswara (2017) *asset growth* menunjukkan pertumbuhan aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Sehingga penting bagi seorang manajer untuk membuat kebijakan dividen menghasilkan keseimbangan antara dividen yang dibagikan dan laba untuk operasional perusahaan guna pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Jaminan aset atau Collateralizable Asset

Menurut Darmayanti dan Mustanda (2016) jaminan aset adalah besaran aset yang dijaminkan oleh perusahaan kepada kreditur saat akan mengajukan pinjaman. Tingginya jaminan aset yang dimiliki perusahaan akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur sehingga perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah besar. Sebaliknya, semakin rendah jaminan aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur sehingga kreditur akan menghalangi perusahaan untuk membiayai dividen dalam jumlah besar kepada pemegang saham karena takut piutang mereka tidak akan terbayar. Jaminan asset ini digunakan oleh kreditur sebagai alternatif terakhir untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan terhadap kredit yang diberikan, selain itu untuk menjadi motivasi kepada debitur dalam membayar kredit tepat waktu karena jaminannya ditahan oleh kreditur (Kasmir, 2018:287).

Riyanto (2013:217-218) menjelaskan jaminan dibedakan menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok yaitu semua barang yang dibelanjakan dengan kredit bank, atau dapat dikatakan sebagai objek kredit bank. Sedangkan jaminan tambahan merupakan barang yang dijadikan jaminan namun tidak dibelanjakan dengan kredit bank, contohnya seperti tanah, bangunan, inventaris perusahaan, perhiasan dan sebagainya. Bank juga dapat menambahkan syarat-syarat untuk mengamankan kreditnya, syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Asuransi dari milik-milik perusahaan/ proyek.

b. Pernyataan bahwa si peminjam tidak akan menjaminkan barangbarang lainnya untuk mendapatkan pinjaman lagi dari sumber lain.

c. Pembatasan jumlah pinjaman dari sumber lain.

d. Penetapan agar perusahaan senantiasa menjaga kecukupan *net working capital.*

e. Persyaratan-persyaratan dalam menunjukan pimpinan perusahaan, penambahan barang modal dan pembagian keuntungan.

2.1.8 Posisi kas (cash position)

Posisi kas *(cash position)* adalah menggambarkan jumlah kas yang tersedia dibandingkan dengan laba bersih perusahaan, dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana kas digunakan dalam mencukupi kebutuhan operasional perusahaan dalam jangka pendek. Besar kecilnya posisi kas menunjukan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola dana tunai di dalam perusahaan serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil (Simatupang & Kholis, 2017). Posisi kas yang besar merupakan kekuatan bagi perusahaan. Hal tersebut disebabkan kas sangat dibutuhkan dalam pembiayaan operasional.

Posisi kas yang tinggi atau baik, menunjukkan kinerja perusahaan yang baik pula. *Cash position* merupakan suatu instrumen pertukaran dan digunakan sebagai alat ukuran dalam suatu akuntansi. Jika perusahaan mempunyai posisi kas bagus, maka ada peluang dalam kemampuannya untuk membagi dividen kepada investor. Perusahaan yang memiliki posisi kasnya mampu mendanai pertumbuhan internal, serta melunasi hutangnya. Sementara jika perusahaan

tidak memiliki posisi kas maka perusahaan tersebut tidak mampu untuk mempertahankan produktivitas atau membiayai dividen terhadap investornya.

2.1.9 Struktur modal

Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri (Margaretha, 2014:305). Struktur modal merupakan pertimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Menentukan struktur modal yang optimal, para manajer keuangan perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai berikut: tingkat penjualan, struktur asset, tingkat pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, variabel laba dan perlindungan pajak, skala perusahaan, dan kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Struktur modal perusahaan diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER).

DER merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi tingkat leverage maka dividen yang dibagikan semakin kecil atau semakin rendah, karena tingkat *leverage* menunjukkan bahwa investee melunasi kewajiban dari laba yang ada sehingga dividen yang dibagikan ke investor menjadi kecil. Peringkat utang akan memengaruhi tingkat pendapatan bersih yang diterima pemegang saham, hal ini disebabkan perusahaan akan membiayai utang terlebih dahulu kemudian sisa keuntungan akan dibagikan sebagai dividen.

UNMAS DENPASAR

Apabila manajemen memutuskan untuk melunasi utang yang sudah jatuh tempo, maka perusahaan perlu menahan laba yang diperoleh dalam jumlah yang besar, dengan demikian dividen yang dibayarkan menjadi kecil. Peningkatan utang akan memengaruhi tingkat pendapatan bersih yang diterima pemegang saham hal ini disebabkan perusahaan akan membiayai utang terlebih dahulu kemudian sisa keuntungan akan dibagikan sebagai dividen. (Kasmir,2017:112).

2.1.10 Perbankan

Bank adalah perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta perekonomian nasional. Dalam perekonomian yang sangat modern seperti saat ini, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran bank dalam aktivitasnya. Ini dapat dilihat dengan semakin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan kelebihan uang yang dimiliki, meminjam uang (kredit) untuk kebutuhan usaha, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya pertumbuhan jumlah bank di indoneisa, walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi perbankan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

UNMAS DENPASAR

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir,2017:212).

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

2.1.11 Fungsi Perbankan

Menurut Erjawan (2018) beberapa fungsi perbankan diantaranya adalah sebagai berikut.

a) Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan *(trust)*, baik dalam hal mengimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur

UNMAS DENPASAR

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjaman, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sector rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan baik berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill.

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi. Kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah keguatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat .

c) *Agent of service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa

UNMAS DENPASAR

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.12 Penelitian Sebelumnya

Dewi dan Sedana (2018) meneliti tentang pengaruh struktur modal, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. Populasi pada penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015 sejumlah 143 perusahaan. Sampel yang diperoleh berdasarkan pada teknik *purposive sampling*, dan diperoleh 9 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Ohoirenan, dkk. (2017) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor *leverage*, pertumbuhan perusahaan dan *collateralizable asset*s yang mempengaruhi kebijakan dividen. Populasi pada penelitian perusahaan *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016). Sampel yang diperoleh berdasarkan pada teknik *purposive sampling*, dan diperoleh 18 perusahaan. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa secara simultan *leverage*, pertumbuhan perusahaan dan *collateralizable assets* terhadap kebijakan dividen. Secara parsial *leverage* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen sedangkan pertumbuhan perusahaan dan *collateralizable assets* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

UNMAS DENPASAR

Helmina & Hidayah (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *institusional ownership, collateralizable assets, debt to total assets, firm size* terhadap *dividend payout ratio*. Populasi dari penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014 sejumlah 136 perusahaan. Sampel sebanyak 27 perusahaan diambil dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *institusional ownership* memiliki pengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* sedangkan *collateralizable assets, debt to total assets,* dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *dividend payout ratio*.

Ferilianto dkk. (2018) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, institusional, dan *leverage* terhadap kebijakan dividen. Populasi dari penelitian adalah perusahaan perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. Sampel sebanyak 57 perusahaan diambil dengan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen sedangkan kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Wahyuliza dan Fahyani (2019) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, struktur modal dan *return on equity (*ROE*)* terhadap kebijakan dividen. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 sebanyak 131 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*

UNMAS DENPASAR

sehingga dihasilkan 22 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, ukuran perusahaan, struktur modal dan *return on equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Muslih dan Husin (2019) meneliti tentang pengaruh *debt to equity ratio, collateralizable asset, sales growth, free cash flow* dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 13 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga diperoleh 65 data sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *debt to equity ratio,* dan *collateralizable asset* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan untuk *sales growth, free cash flow* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

UNMAS DENPASAR

Agustina, dkk. (2020) meneliti tentang pengaruh *cash position* dan *firm size* terhadap kebijakan dividen dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Populasi penelitian adalah perusahaan perusahaan sektor Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 sebanyak 20 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga dihasilkan 9 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah *Path Analysis* dengan alat analisis *SmartPLS 3.0.* Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

cash position , *firm size* dan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. *Cash position* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Terdapat pengaruh *firm size terhadap profitabilitas*, hasil penelitian ini menunjukan arah negatif. Mediasi yang dilakukan *profitabilitas* atas pengaruh *cash position* dan *firm size* terhadap kebijakan dividen tidak dapat terjadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, jaminan aset, posisi kas dan struktur modal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain menggunakan variabel likuiditas, *leverage*, kepemilikan manajerial, *free cash flow*, ukuran perusahaan, dan *return on equity* (ROE). Selain perbedaan variabel, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada periode 2017-2020 dan sumber amatan dari penelitian ini adalah penelitian 4 tahun terakhir.